



**Pemerintah Kabupaten Grobogan**

# **RENCANA KERJA KECAMATAN GEYER TAHUN 2024**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Geyer selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Geyer pada Tahun Anggaran 2024. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan usulan rencana Bottom Up dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa , Kecamatan dan tingkat Kabupaten

prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. Renja PD Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Dokumen RKPD Pemerintah

Kabupaten Grobogan. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja Perangkat Daerah, Dokumen RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 ).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8 );
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan;
18. Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 050/474 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah 2021 -2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geyer**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geyer dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geyer adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

**1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geyer**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Geyer Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I    PENDAHULUAN**

- 1.1    Latar Belakang
- 1.2    Landasan Hukum
- 1.3    Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geyer
- 1.4    Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geyer

**BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEYER  
TAHUN LALU**

- 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Geyer 2021 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1    Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2    Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3    Program dan Kegiatan

**BAB IV   RENCANA KEJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Geyer

**BAB V   PENUTUP**

**BAB II.**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN GEYER**  
**TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Geyer sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Geyer melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Kecamatan Geyer Tahun 2021-2026 , untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Target capaian program Renstra Kecamatan Geyer; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Geyer Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Geyer**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Geyer Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Geyer tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Grobogan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	2.868.897.338	1.891.719.293	2.749.787.500	2.321.505.588	1	2.754.897.338	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	25.000.000	0				2.000.000	
7	01	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	2.213.897.338	1.316.977.554	2.294.010.000	1.784.933.375	1	2.213.897.338	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	75.000.000	11.730.000	13.575.000	13.575.000	1	15.000.000	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.000.000	225.326.500	245.364.500	291.334.500	1	254.000.000	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	120.000.000	224.845.700	53.330.000	95.398.200	2	68.000.000	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000	75.502.039	85.751.000	78.507.513	1	95.000.000	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	57.000.000	37.337.500	57.757.000	57.757.000	1	107.000.000	



7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	23.000.000	25.157.500	41.447.500	38.297.500	1	41.700.000		
7	01	02	2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi		15.892.500	18.700.000	17.800.000	1	18.700.000		
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	5.500.000		5.395.000	4.045.000	1	5.500.000		
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	17.500.000	9.265.000	17.352.500	16.452.500	1	17.500.000		
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	29.000.000	0	0	0		10.000.000		
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tk kecamatan yg mendapatkan pembinaan	9.000.000					10.000.000		
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		20.000.000							
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	10.000.000	9.570.000	9.727.500	8.827.500	1	10.000.000		
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	9.570.000	9.727.500	8.827.500	1	10.000.000		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	40.000.000					32.000.000		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	40.000.000					32.000.000		
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	25.000.000	10.037.500	9.802.500	8.452.500	1	10.000.000		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	25.000.000	10.037.500	9.802.500	8.452.500	1	10.000.000		
						2.970.897.338	1.926.446.793	2.800.962.500	2.368.630.588		2.848.597.338		

Tabel 2.1.1  
Pencapaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kecamatan Geyer  
KabupatenGrobogan

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1,943,608,000	2,517,495,500	7,267,058,126	2,913,897,338	2,913,897,338	2,913,897,338	1,891,719,293	2,321,505,588					0.973302895	0.92214885				-		-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,353,488,000	1,968,848,000	1,783,099,206	2,213,897,338	2,213,897,338	2,213,897,338	1,316,977,554	1,784,933,375					0.973024921	0.9065877				-		-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,750,000	13,575,000	15,400,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	11,730,000	13,575,000					0.92	1				-		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234,136,500	291,459,500	247,415,000	263,000,000	263,000,000	263,000,000	225,326,500	291,334,500					0.962372377	0.99957112				-		-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226,225,000	100,105,000	5,029,191,920	200,000,000	200,000,000	200,000,000	224,845,700	95,398,200					0.993902973	0.95298137				-		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,671,000	85,751,000	98,415,000	115,000,000	115,000,000	115,000,000	75,502,039	78,507,513					0.947672792	0.91552883				-		-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,337,500	57,757,000	93,537,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000	37,337,500	57,757,000					1	1				-		-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	27,672,500	40,547,500	75,521,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	25,157,500	38,297,500					0.909115548	0.94450953				-		-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17,507,500	18,700,000	18,700,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	15,892,500	17,800,000					0.90775382	0.95187166				-		-

[illegible]

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Geyer dan pencapaian Renstra Kecamatan Geyer s/d Tahun 2022 dapat diketahui bahwa ada yang belum tercapainya target kinerja keuangan dengan seratus persen disebabkan adanya beberapa hambatan dan kendala, antara lain

1. Adanya Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan beberapa anggaran dalam program/kegiatan banyak dilakukan refocussing guna untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Grobogan .;
2. Perencanaan yang kurang optimal, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak dapat terserap secara optimal; dan
3. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selalu berusaha melaksanakan tugas secara kreatif dan normatif.

Hal ini tercermin pada beberapa program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

**b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

**c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

**2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Geyer  
Kabupaten Grobogan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			NA	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	NA	82,5			
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD			NA	B(65)	B(68)	BB(70)	NA	B			

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **a. Permasalahan Sekretariat**

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ( Pengelola Keuangan dan Kepegawaian )
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

#### **b. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Geyer dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana pendukung kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

#### **c. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

#### **d. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

#### **e. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

#### **f. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum**

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat



**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal renja SKPD Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2024 ( sumber data dari SIPD tahun 2024 ).

**Program dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**  
Kab. Ende  
Tahun 2024

Nilai Anggaran : 7.018.000.000.000 (Tujuh Miliar)  
Sub Unit Organisasi : 7.018.000.000.000 Kecamatan Geyer

Kode				Bidang / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Profilan Mula Rencana Tahun 2025					
							Capaian Program	Indikator Sub Kegiatan	Makna Kegiatan	Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Eksekusi Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Kategori Sub Kegiatan	Unit Kegiatan	Substansi	Target	
1																	
1	00																
1	00	01															
1	00	01	3.01														
1	00	01	3.01	01													











Unit Organisasi : 1.05.0.05.5.00.00.0000 Kecamatan Geyer  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.05.5.00.05.0000 Kecamatan Geyer

Rencana Tahun 2024															Catatan Penting	Pembinaan Madya Rencana Tahun 2025			
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Maks. Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Maks. Indikator (Rp.))			
					Capaian Program	Kuantitas dan Regulasi	Hasil Kegiatan		Program	Kuantitas dan Regulasi	Maks. Regulasi			Kuantitas	Target				
						Jumlah Kesenakan Persewaan Dinas atau Kesenakan Dinas jabatan yang dipisahkan dan dipisahkan Pajaknya		Kap. Grogogan, Bayat, Semua Kari/Diem		7 Unit		42.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Persewaan Dinas jabatan yang dipisahkan dan dipisahkan Pajaknya	7 Unit	42.000.000.00		
						Pembelian Jasa Persewaan, atau Persewaan, atau Pajak Kesenakan Persewaan Dinas atau Persewaan Dinas jabatan						42.000.000.00							
7	01	00	2.09	06	Pembelian Persewaan dan Pajaknya														
						Jumlah Persewaan dan Pajaknya yang dipisahkan		Kap. Grogogan, Bayat, Semua Kari/Diem		12 Unit		25.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Persewaan dan Pajaknya yang dipisahkan	12 Unit	25.000.000.00		
						Pembelian Persewaan Persewaan dan Pajaknya						25.000.000.00							
TOTAL												4.076.847.500,00					4.076.847.500,00		





2.5. Penelaah usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Grobogan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Grobogan yang diajukan ke Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Geyer berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Setelah di laksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Geyer tidak terdapat Usulan dari pemangku Kepentingan dalam RKPD ataupun Renja Tahun 2024 .Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				


### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

***“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”***

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Geyer yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Geyer, adalah **meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”**

Dari tujuan tersebut diatas maka **sasaran** yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat
- 2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kapsitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan							
		Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan						
			Nilai SAKIP	B (65)	B (68)	BB (70 )	BB (72 )	BB (73,5)

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Geyer guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Secara lebih lengkap mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Geyer tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Geyer

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi Capaian Proyeki					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		Tahun ke 2 2022	Tahun ke 3 2024	Tahun ke 4 2024	Tahun ke 5 2025	Tahun ke 6 2026	Tahun ke 2 2022	Tahun ke3 2024	Tahun ke 4 2024	Tahun ke 5 2025	Tahun ke 6 2026		
		Target	Target	Target	Target	Target	%	%	%	%	%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	41,447,500	41,700,000	43,000,000	44,000,000	47,000,000	17,800,000					Kec. Geyer	Kec. Geyer
		80%	85%	85%	90%	100%	80%	85%	85%	90%	100%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	18,700,000	18,700,000	19,000,000	20,000,000	21,000,000	17,800,000						
		80%	85%	85%	90%	100%	80%	85%	85%	90%	100%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	18,700,000	18,700,000	19,000,000	20,000,000	21,000,000	17,800,000						
		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1Keg	80%	85%	85%	90%	100%		

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	5,395,000	5,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,045,000						
		75%	80%	85%	90%	100%	75%	80%	85%	90%	100%		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)	5,395,000	5,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,045,000						
		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	75%	80%	85%	90%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	17,352,500	17,500,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	16,452,500						
		75%	80%	85%	90%	100%	75%	80%	85%	90%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	17,352,500	17,500,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	16,452,500						
		2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	75%	80%	85%	90%	100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
			80%	85%	90%	100%		80%	85%	90%	100%		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-						

			80%	85%	90%	100%		80%	85%	90%	100%		
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-						
			35 Org	40 Org	40 Org	40 Org		80%	85%	90%	100%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	9,727,500	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	8,827,500						
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9,727,500	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	8,827,500						
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dari TNI/POLRI di wilayah kecamatan			10,000,000	10,000,000	10,000,000							
				40 Org	40 org	40 org	100%	100%	100%	100%	100%		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	9,727,500	10,000,000	-	-	10,000,000	8,827,500						
		1 Keg	1 Keg			1Keg	100%	100%	100%	100%	100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	21,095,000	32,000,000	32,000,000	33,000,000	33,000,000							



		80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	21,095,000	32,000,000	32,000,000	33,000,000	33,000,000							
		80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	21,095,000	22,000,000	22,000,000	23,000,000	23,000,000							
		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1Keg	80%	85%	90%	95%	100%		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
			40 Org	40 org	40 org	40 org		85%	90%	95%	100%		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	9,802,500	10,000,000	20,000,000	20,000,000	24,000,000	8,452,500						
		80%	85%	85%	90%	100%	80%	85%	85%	90%	100%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	9,802,500	10,000,000	20,000,000	20,000,000	24,000,000	8,452,500						
		80%	85%	85%	90%	100%	80%	85%	85%	90%	100%		

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	-						
			13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa		85%	85%	90%	100%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,802,500	-	10,000,000	10,000,000	12,000,000	8,452,500						
		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>P ersentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</b>	<b>2,749,787,500</b>	<b>2,754,897,338</b>	<b>2,857,941,231</b>	<b>2,899,048,879</b>	<b>2,917,734,718</b>							
		85%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	-	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-						
			85%	90%	90%	100%		100%	100%	100%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	-	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-						
			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		100%	100%	100%	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	2,294,010,000	2,213,897,338	2,213,941,231	2,214,048,879	2,214,734,718							
		85%	85%	90%	95%	100%	85%	85%	90%	95%	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	2,294,010,000	2,213,897,338	2,213,941,231	2,214,048,879	2,214,734,718	1,784,933,375						

		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	13,575,000	15,000,000	45,000,000	50,000,000	50,000,000	13,575,000						
		85%	85%	90%	95%	100%	85%	85%	90%	95%	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13,575,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	13,575,000						
		25 Bh	25 Bh	25 Bh	25 Bh	25 Bh	100%	100%	100%	100%	100%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	30,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-					
				25 org	27 org	30 org			100%	100%	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	245,364,500	254,000,000	258,000,000	274,000,000	281,000,000	291,334,500						
		85%	85%	90%	95%	100%	85%	85%	90%	95%	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17,078,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000	17,078,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	65,700,000	70,000,000	72,000,000	75,000,000	80,000,000	84,200,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	17,962,500	18,000,000	18,000,000	19,000,000	19,000,000	17,962,500						

		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4,200,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,200,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	36,694,000	38,000,000	40,000,000	45,000,000	45,000,000	42,089,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,730,000	105,000,000	105,000,000	110,000,000	112,000,000	125,805,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	53,330,000	68,000,000	94,000,000	94,000,000	90,000,000							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	53,330,000	28,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	52,693,200						
		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	46,775,000	10,000,000	10,000,000	-	-	45,705,000						
		-	1 Unit	1 Unit			-	100%	100%				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	30,000,000	34,000,000	44,000,000	40,000,000	-						
			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100%	100%	100%	100%		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,751,000	95,000,000	99,000,000	104,000,000	105,000,000							
		85%	85%	90%	95%	100%	85%	85%	90%	95%	100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	36,100,000	40,000,000	42,000,000	43,000,000	45,000,000	36,100,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000	20,000,000	21,000,000	23,000,000	23,000,000	12,756,513						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	29,651,000	35,000,000	36,000,000	38,000,000	37,000,000	29,651,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	57,757,000	107,000,000	145,000,000	160,000,000	174,000,000							
		80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	42,780,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,780,000						
		7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	14,977,000	15,000,000	18,000,000	18,000,000	22,000,000	14,977,000						
		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara		50,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000							
			1 Paket	1 Paket	1 paket	1Paket		100%	100%	100%	100%		

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-					
				1 Unit	1 Unit	1 Unit			100%	100%	100%		
		2,831,860,000	2,858,597,338	2,972,941,231	3,016,048,879	3,051,734,718							

## A.VISI DAN MISI

### a. Visi

**Visi** merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah :

***“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”***

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Kabupaten Grobogan yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

**Beriman**, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

**Berbudaya**, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Geyer adalah masuk pada Visi Berbudaya.

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

##### **2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

##### **3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan,



meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

**4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

**5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat**

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Geyer, adalah meningkatkan kapasitas

SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”

**Sasaran** adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Geyer dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Geyer dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

- 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat
- 4. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Geyer beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini. Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  
Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target				
				2022	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan							
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas	Nilai SAKIP	B (65)	B ( 68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target				
				2022	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan						

### C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

#### a. STRATEGI KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Geyer dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan,penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

#### b. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang diambil SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan kantor Kecamatan Geyer dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat

4. peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
5. peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan

## **2. PROGRAM**

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Geyer menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Seksi;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Kecamatan Geyer maupun Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Program dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

#### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**a. Terkait Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

**b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

**c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- Sinergmitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

**6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN GEYER**

**A. Kedudukan Program/Kegiatan Kecamatan Geyer Tahun 2024 Menurut Rencana Kerja Jangka Menengah.**

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di dukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni”. Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana kedudukan Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2026.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Geyer yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun  
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Geyer

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Kecamatan Geyer			4.075.897.338,00				3.076.597.338,00
7				UNSUR KEWILAYAHAN			4.075.897.338,00				3.076.597.338,00
7	01			KECAMATAN			152.000.000,00				146.700.000,00
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.000.000,00				23.000.000,00
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			5.500.000,00				5.500.000,00
7	01	02	2.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00
				Bimbingan Teknis Penyusunan SOP			5.500.000,00				
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			17.500.000,00				17.500.000,00
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	2 Laporan	17.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	17.500.000,00
				Pembinaan penyusunan Proposal Keagamaan			10.000.000,00				
				Bimbingan Teknis PATEN			7.500.000,00				
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			29.000.000,00				30.000.000,00
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			9.000.000,00				10.000.000,00
7	01	03	2.03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
				Pembinaan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Desa			9.000.000,00				
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			20.000.000,00				20.000.000,00
7	01	03	2.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							



					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	50 Keluarga	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Keluarga	20.000.000,00
					Bimtek Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing			20.000.000,00				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	04	2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000,00
					Pelatihan Anggota Satlinmas Desa Se Kecamatan			10.000.000,00				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			40.000.000,00				40.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			40.000.000,00				40.000.000,00
7	01	05	2.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	130 Orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi U		130 Orang	30.000.000,00
					Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan			30.000.000,00				
7	01	05	2.01		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	40 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi U		40 Orang	10.000.000,00
					Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat			10.000.000,00				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			25.000.000,00				25.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi			25.000.000,00				25.000.000,00
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7	01	06	2.01		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000,00
					<i>Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</i>			15.000.000,00				
7	01	06	2.01		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	10.000.000,00
					<i>Bimtek Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pendapatan dan Desa</i>			10.000.000,00				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.000.000,00				18.700.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000,00				18.700.000,00
7	01	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	18.700.000,00
					<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TK Kecamatan</i>			25.000.000,00				
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			3.923.897.338,00				2.929.897.338,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.923.897.338,00				2.929.897.338,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.213.897.338,00				2.413.897.338,00
7	01	01	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	21 Orang/bulan	2.213.897.338,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Orang/bulan	2.413.897.338,00
					<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			2.213.897.338,00				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75.000.000,00				25.000.000,00
7	01	01	2.05		Penyediaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
					Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	2 Paket	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	25.000.000,00
					<i>Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			25.000.000,00				
7	01	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Orang	0,00
					<i>Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang - Undangan dan Studi Komparasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Servis Excellent</i>			50.000.000,00				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			263.000.000,00				259.000.000,00
7	01	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semua Kel/Desa	1 Paket	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	18.000.000,00
					<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>			18.000.000,00				

7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	3 Paket	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	70.000.000,00
				Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				70.000.000,00				
7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	2 Paket	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	18.000.000,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.000.000,00				
7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00				
7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan/Material								
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	2 Paket	47.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	47.000.000,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor				38.000.000,00				
				Penyediaan alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor				9.000.000,00				
7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	800 Laporan	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Laporan	110.000.000,00
				Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.000.000,00				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah				75.000.000,00				
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.200.000.000,00				70.000.000,00
7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	10 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	70.000.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00				
7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	1 Unit	1.100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0,00
				Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Geyer				1.100.000.000,00				
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.000.000,00				105.000.000,00
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.000.000,00
				Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000,00				
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20.000.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.000.000,00				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	12 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	80.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			80.000.000,00				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.000.000,00				57.000.000,00
7	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	7 Unit	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	42.000.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			42.000.000,00				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Grobogan, Geyer, Semus Kel/Desa	12 Unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	15.000.000,00
					Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000,00				
								4.075.897.338,00				3.076.597.338,00



## V. PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Geyer yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Geyer ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Kecamatan Geyer, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dengan capaian program:

1. Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
2. Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap
3. Persentase lembaga masyarakat aktif
4. Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif
5. Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan
6. Persentase desa dengan tertib administrasi

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Geyer tahun 2024 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditahun ini.

Geyer,       Maret   2024

  
**CAMAT GEYER**  
**JOJO, S.IP**  
Pembina  
NIP 197102101992031004